



Tak Hanya Pidana, Kami Tuntut Restitusi

■ Polisi Telusuri Aset Pemilik Yayasan Little Aresha

Kami tidak hanya menuntut pidana. Kami juga menuntut hak restitusi. Kami ingin semua biaya yang telah dikeluarkan, baik untuk biaya pendidikan di sana, biaya rumah sakit, hingga biaya rehabilitasi psikologi anak kami, dikembalikan.

YOGYA, TRIBUN - Gurat kesedihan sekaligus kegeraman tidak dapat disembunyikan dari wajah Sukirman, warga Tahunan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Ia hanya bisa mengelus dada melihat kondisi buah hatinya yang saat ini harus berjuang melawan trauma fisik dan psikis di usia yang sangat belia.

Anak Sukirman, yang dititipkan di Little Aresha Daycare selama sembilan bulan, tengah menanggung diagnosa medis GERD atau asam lambung kronis. Penyakit yang biasanya menyerang orang dewasa tersebut, justru hinggap di tubuh mungil sang anak akibat dugaan salah pola asuh selama berada di lembaga itu.

"Anak kami mengalami GERD, asam lambung. Saat diperiksakan di awal, kondisinya sempat dehidrasi parah karena dalam sehari pernah muntah dan diare sampai 18 kali," ungkapnya, saat ditemui di kediamannya, Kamis (7/5).

● ke halaman 11

Pastikan Proses Hukum Transparan dan Akuntabel

WAKIL Ketua DPR RI Sari Yulianti memantau perkembangan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresha dengan mengunjungi Polda Yogyakarta guna memastikan proses berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada korban.

Sari mengatakan, penanganan kasus kekerasan anak harus berdiri di atas dua pilar utama, yaitu penegakan hukum yang tegas dan langkah pencegahan yang sistematis. "Penegakan hukum ini penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus menjadi peringatan keras bagi siapa pun agar tidak melakukan tindakan serupa," kata Sari dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis (7/5) seperti dikutip dari Antaranews.com.

● ke halaman 11



HUKUMAN SETIMPAL

- Sukirman, salah satu orang tua korban Daycare Little Aresha, tidak hanya menuntut pidana. Pihaknya juga menuntut hak restitusi. Mereka meminta semua biaya yang telah dikeluarkan, baik untuk biaya pendidikan, biaya rumah sakit, hingga biaya rehabilitasi psikologi anak dikembalikan.
- Anak Sukirman yang berusia 1 tahun saat ini alami trauma berat dan harus melawan GERD.
- Pengurus Wilayah Ikatan Pengusaha Muslimin Indonesia (PW IPMI) DIY meminta pelaku dipenjara seumur hidup.
- Polisi akan menelusuri aset milik yayasan Little Aresha Yogyakarta sebagai konsekuensi hukum guna memenuhi hak restitusi para korban dugaan kekerasan di daycare.
- Selain pasal kekerasan terhadap anak, Polisi juga menjerat Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah menggunakan pasal korporasi.



Dugaan Keracunan Usai Santap MBG

KPK Kaji Pengadaan Sepatu Rp27 Miliar untuk Sekolah Rakyat

JAKARTA, TRIBUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan informasi terkait anggaran pengadaan sepatu untuk siswa di Sekolah Rakyat mencapai Rp27 miliar akan menjadi bahan pengayaan dalam kajian yang sedang dilakukan tim KPK.

"KPK juga sudah masuk dalam kerangka pencegahan dengan melakukan kajian terkait dengan program Sekolah Rakyat sehingga informasi-informasi ini (sepatu siswa) tentu akan menjadi pengayaan bagi tim," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (7/5).

Budi mengatakan, dari informasi tersebut, tim KPK akan melihat proses bisnis dalam pengadaan program tersebut. Dia mengatakan, jika memang dalam tahapannya ditemukan celah korupsi, kerangka pencegahan yang disiapkan diharapkan bisa memitigasi tindakan tersebut.

● ke halaman 11

Tak Hanya Pidana,

• Sambungan Hal 1

Akibat kondisi fisik yang merosot tajam sepanjang ditiptkan di Little Aresha, buah hatinya beberapa kali terpaksa menjalani rawat inap di rumah sakit. Bahkan hingga saat ini, gejala batuk dan pilek yang menyertainya tidak kunjung sembuh total meski sudah mendapatkan penanganan medis rutin melalui fasilitas kesehatan.

Selain kondisi fisik yang belum pulih secara penuh dari rasa sakit, luka batin yang hingga kini dialami anak perempuan tersebut tak kalah dalam. Sukirman menceritakan, bagaimana setiap malam rumahnya pecah oleh suara tangisan histeris, karena buah hatinya mengalami semacam gangguan tidur.

"Psikisnya sangat terganggu. Masih suka terkejut. Setiap tidur malam itu, setiap satu jam sekali terbangun, teriak histeris. Dia langsung mencari kami (orang tua) kalau nggak ada di sampingnya," tuturnya.

Kini, balita yang ditiptkan sejak usia 3 bulan hingga 1 tahun mendapat pendampingan dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Yogyakarta untuk rehabilitasi psikologi. Sukirman bersama para wali murid lainnya pun tak tinggal diam dan sepakat menyeret kasus ini ke meja hijau, dengan pendampingan puluhan pengacara yang disediakan Pemkot.

Sukirman menilai, apa yang terjadi di daycare tersebut merupakan tindakan yang terstruktur dan sistematis karena berlangsung selama bertahun-tahun. Pihaknya pun menuntut aparat penegak hukum menjerat para pelaku dengan pasal berlapis, mulai dari penelantaran, penganiayaan, penipuan, hingga pasal korporasi.

"Alhamdulillah sampai saat

ini sudah ada 31 lawyer yang mendampingi kami (para korban Little Aresha Daycare) untuk proses hukum," ucapnya.

Garis polisi kini memang telah melintang di depan gedung, menandai penutupan permanen daycare di kawasan Sorosutan, Kemantren Umbulharjo tersebut. Namun, bagi Sukirman dan puluhan orang tua lainnya, perjuangan untuk menyembuhkan luka dan mendapat keadilan bagi buah hati mereka baru saja dimulai.

"Kami tidak hanya menuntut pidana. Kami juga menuntut hak restitusi. Kami ingin semua biaya yang telah dikeluarkan, baik untuk biaya pendidikan di sana, biaya rumah sakit, hingga biaya rehabilitasi psikologi anak kami, dikembalikan," pungkasnya.

Penjara seumur hidup

Pengurus Wilayah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (PW IPEMI) DIY menyatakan sikap tegas agar seluruh pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut mendapat sanksi hukum maksimal.

Desakan disampaikan langsung oleh Ketua PW IPEMI DIY, Sumarni S. Jasmin, saat menyambangi kediaman salah satu korban di kawasan Tahunan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Kamis (7/5).

Sebagai seorang ibu sekaligus nenek, ia mengaku sangat terpukul melihat dugaan tindak kekerasan dan penelantaran yang menimpa ratusan balita di penitipan anak tersebut. "Saya ikut prihatin, rasanya trenyuh hati saya. Saya tidak bisa melihat yang seperti ini, langsung teringat cucu. Rasanya sedih banget. Kami dari IPEMI mendoakan semoga semua korban diberi kekuatan, keikhlasan, dan anak-anak bisa tumbuh kembali dengan semestinya," ujarnya.

Namun, di balik rasa empati tersebut, Sumarni yang

juga merupakan seorang praktisi hukum menekankan bahwa jalur keadilan harus ditegakkan tanpa kompromi. Apalagi, fakta bahwa sebagian besar pelaku adalah perempuan seharusnya membuat mereka memiliki naluri melindungi, bukan malah sebaliknya.

"Saya juga kuasa hukum, saya inginnya pelaku diadili seadil-adilnya. Bila perlu dipenjara seumur hidup. Mereka seolah tidak memiliki hati nurani melihat bayi diikat, diperlakukan seperti itu, seperti yang sudah viral di media sosial. Penegak hukum di Yogyakarta harus turun tangan dan serius menanganj ini," tegasnya.

Sementara itu, Polisi akan menelusuri aset milik Yayasan Little Aresha Yogyakarta sebagai konsekuensi hukum guna memenuhi hak restitusi para korban dugaan kekerasan di daycare Little Aresha. Sebagaimana diketahui, selain pasal kekerasan terhadap anak, Polisi juga akan menjerat Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah menggunakan pasal korporasi.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Yogyakarta, Iptu Apri Sawitri, meski penelusuran aset belum dilakukan, namun para penyidik sudah menyiapkan langkah tersebut.

"Kalau itu (penelusuran aset) pastinya, ya. Tapi nanti akhir, ya," kata Apri, saat dikonfirmasi, Kamis (7/5).

Apri menyampaikan saat ini pihak kepolisian masih fokus penyidikan terkait dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Mengenai upaya penyidikan dan upaya hukum dari pasal lainnya, Apri menegaskan akan segera dilakukan.

"Soalnya kalau dari kami sendiri fokus di kasus terkait dengan perlindungan anak," tegasnya.

Apri menyebut saat ini pihak kepolisian bergerak cepat

untuk merampungkan berkas perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak di daycare tersebut.

Ketua Tim Hukum Peduli Anak Yogyakarta, Deddy Sukmadi, menyatakan, pihaknya tengah berfokus pada penguatan bukti-bukti kerugian yang dialami orang tua dan anak-anak selama menitipkan buah hati di daycare yang berlokasi di Kemantren Umbulharjo tersebut.

"Kami akan berkoordinasi dengan kepolisian apakah hal itu (restitusi) memungkinkan atau tidak. Karena kita harus membuktikan kerugian-kerugian yang telah terjadi. Dalam hukum pidana, ini adalah proses pembuktian. Mekanismenya harus jelas, di mana letak kesalahannya dan apa buktinya," ujarnya, Rabu (6/5).

Selain fokus pada tindakan kekerasan personak, tim hukum juga tengah melakukan analisa mendalam terkait peluang penjeratan pasal pidana korporasi. "Kita sedang menganalisa apakah pasal-pasal lain memungkinkan untuk dimasukkan. Terutama soal korporasi karena ini dalam bentuk yayasan. Itulah yang menjadi concern kita terhadap problem ini," lanjutnya.

Meski peluang penyitaan aset korporasi terbuka secara regulasi, jajaran Tim Hukum Peduli Anak Yogyakarta mengakui ada tantangan teknis di lapangan. Salah satunya adalah status gedung operasional daycare yang disinyalir merupakan properti kontrak milik warga setempat, bukan aset yayasan secara mandiri.

"Kita harus olah data-data nya, apakah ada asetnya atau tidak. Seberapa besar kepemilikannya. Bahkan saya dengar gedungnya itu kontrak, milik orang lain yang juga sempat protes karena rumahnya dicoret-coret," ungkapnya. (aka/hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005